

FAKTOR KONTINUITAS POLITIK LUAR NEGERI MESIR TERHADAP AMERIKA SERIKAT PASCA REVOLUSI 2011

Hafid Adim Pradana

Universitas Muhammadiyah Malang
adimhafid@gmail.com

Abstract

Revolution happening in a country often impact on the country's foreign political change. However, the revolution that occurred in Egypt in 2011, followed by the election of Mohammed Morsi of the Muslim Brotherhood as the first civilian president of Egypt, it did not change the foreign policy of Egypt, particularly against the United States. In that sense, Egypt is still continuing good relations with the United States as in the reign of Hosni Mubarak. This research aims to explain the factors that affect no change in Egypt's foreign policy towards the United States after the revolution of 2011, especially in the era of Mohammad Mursi. In this study, the authors use the neoclassical realism theory which states that the foreign policy adopted by a country is the result of domestic political dynamics that are influenced by international structures. By using literature data collection, this study resulted in the finding that no change in the foreign policy of Egypt during the reign of Mohammad Mursi against the United States are affected by international structures which then impact on Egypt's position which acts as a buffer state of peace in the Middle East. This in turn affects the

occurrence of domestic political dynamics that make Mursi Egypt decided not to change Egypt's foreign policy toward the United States.

Keyword: Domestic Politic; Egypt; Foreign Policy; International Structure

Pendahuluan

Revolusi yang terjadi di suatu negara seringkali berpengaruh terhadap perubahan arah politik luar negeri negara tersebut. Fenomena revolusi Kuba pada 1959 dan Iran pada tahun 1979 merupakan dua contoh relevan terkait efek revolusi terhadap perubahan politik luar negeri. Revolusi yang terjadi di Kuba berawal dari ketidakpuasan rakyat Kuba akan kediktatoran pemerintahan Presiden Fulgencio Batista yang dekat dengan AS. Pada akhirnya, Presiden Batista digulingkan dan digantikan oleh Fidel Castro yang berhaluan sosialis. Di bawah kepemimpinan Castro, politik luar negeri Kuba terhadap AS mengalami perubahan drastis (Gonzalez, 2006). Revolusi Iran pecah menyusul ketidakpuasan rakyat Iran akan kepemimpinan Mohammad Reza Shah Pahlevi yang dinilai terlalu otoriter (Ansari, 2008). Pemerintahan Pahlevi pada akhirnya tumbang dan digantikan oleh pemerintahan baru yang berlandaskan teologi Islam Syiah di bawah komando Ayatullah Khomeini. Pergantian rezim pemerintahan pasca revolusi segera diikuti oleh perubahan ekstrim politik luar negeri Iran terhadap AS. Ini hal yang sangat kontras, mengingat selama beberapa dasawarsa sebelumnya AS merupakan sekutu dekat Iran (Fischer, 2003).

Berselang sekitar tiga dekade kemudian, gerakan rakyat yang berhasil mengakhiri pemerintahan yang telah berkuasa lama terjadi di Mesir. Sebagaimana yang terjadi di Iran, revolusi yang terjadi di Mesir dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan rakyat akan ketidakmampuan pemerintahan Presiden Husni Mubarak dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, serta terbatasnya akses dalam menyampaikan aspirasi

(Tamburaka, 2011). Setelah melalui berbagai protes dan demonstrasi, akhirnya perjuangan rakyat Mesir menuai keberhasilan dengan mundurnya Mubarak pada tahun 2011. Pasca jatuhnya Mubarak, pemerintahan sementara Mesir langsung mengadakan pemilihan umum untuk menentukan presiden terpilih yang pada akhirnya dimenangi oleh Mohammad Mursi.

Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir membuat banyak pihak mengira bahwa politik luar negeri Mesir akan mengalami perubahan besar. Sokongan kuat Ikhwanul Muslimin (IM) di belakang Presiden Mursi dipandang akan mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Mesir untuk lebih kontra Israel dan negara-negara Barat, terutama AS. Akan tetapi, pandangan tersebut menjadi tidak relevan ketika Presiden Mursi dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB pada 26 September 2012 menyatakan bahwa Mesir tidak akan merubah politik luar negerinya secara drastis, khususnya terhadap Amerika Serikat (Ottaway, 2016). Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa politik luar negeri Mesir terhadap AS tidak mengalami perubahan; Mesir tetap berhubungan baik dengan AS seperti pada masa kepemimpinan Husni Mubarak. Fenomena ini merupakan suatu paradoks jika melihat komposisi pemerintahan Mesir saat ini yang dikuasai oleh IM. Secara normal, pergantian rezim sekuler Husni Mubarak menuju rezim kepemimpinan Muhammad Mursi yang disokong oleh gerakan Islamis Ikhwanul Muslimin seharusnya berpengaruh besar terhadap arah kebijakan luar negeri Mesir terhadap AS.

Berangkat dari fenomena di atas, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berubahnya politik luar negeri Mesir terhadap AS. Selain itu, penelitian ini juga merupakan respon terhadap adanya prediksi yang menyatakan bahwa jika Mesir dikuasai oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, maka hal tersebut akan mengubah haluan politik luar negeri Mesir, terutama terhadap AS.

Tinjauan Teoritis: Realisme Neoklasik

Dalam penelitian ini, teori realisme neoklasik digunakan sebagai alat analisa untuk menjelaskan alasan politik luar negeri Mesir dibawah rezim Muhammad Mursi yang tetap konsisten dalam menjaga hubungan baik dengan AS. Realisme Neoklasik merupakan salah satu varian dari Realisme. Keberadaan teori Realisme Neoklasik tidak dapat dilepaskan dari adanya kritik terhadap teori Neorealisme yang digagas Kenneth N. Waltz, yang dinilai tidak cukup mampu dalam menjelaskan perilaku negara secara individual. Neorealisme sendiri merupakan teori mengenai politik internasional, bukan teori politik luar negeri (Rosyidin, 2010), karena Neorealisme hanya hirau pada interaksi antar negara dan berbagai implikasinya, mengingat teori tersebut merupakan teori yang yang memperlakukan struktur internasional sebagai satu-satunya variabel independen (Waltz, 1979). Perbedaan antara Neorealisme dan Realisme Neoklasik dipaparkan oleh Jeffrey W. Taliafero (sebagaimana dikutip oleh Rosyidin, 2010) yang menyatakan bahwa:

“Neorealism seeks to explain international outcome, such as the likelihood of major war, the prospect for international cooperation, and aggregate alliance pattern among states. Neoclassical realism, on the other hand, seeks to explain the foreign policy strategies of individual states.”

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa teori Realisme Neoklasik merupakan teori yang berupaya menjelaskan politik luar negeri suatu negara, berbeda dengan neorealisme yang berfokus pada upaya untuk menjelaskan politik internasional. Dengan demikian, sebagaimana disampaikan oleh Jeffrey W. Taliafero, perbedaan mendasar antara Neorealisme dan Realisme Neoklasik ialah dalam hal fenomena yang ingin dijelaskan (Rosyidin, 2010).

Dalam menjelaskan politik luar negeri, Realisme Neoklasik berupaya mengintegrasikan tingkat analisa unit (Realisme Klasik) dan tingkat analisa struktur (Neorealisme) dalam menjelaskan politik luar negeri. Realisme klasik

hirau dengan sumber-sumber dan penggunaan *national power* dalam politik internasional serta masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan politik luar negeri. Meskipun demikian, seperti halnya Neorealisme, Realisme Neoklasik percaya bahwa lingkungan internasional sebagai arena negara saling berinteraksi merupakan determinan utama bagi kepentingan dan perilaku negara. Hasil kombinasi ini dianggap lebih memadai ketika mencoba memahami perilaku negara di arena internasional (Rosyidin, 2010).

Secara metodologis, kedua level analisis ini dapat dikombinasikan, dimana pada satu sisi, struktur internasional menyediakan prakondisi yang menekan negara, sementara pada sisi lain, politik domestik menyediakan instrumen yang menerjemahkan prakondisi eksternal tersebut atau meminjam istilah Michael Brecher, sebagai filter terhadap lingkungan internasional. Meskipun kedua level analisis dianggap sebagai variabel penjelas, tetapi dalam konteks metodologis, politik domestik atau unit level diperlakukan sebagai variabel tambahan (*intervening variabel*) mengingat Realisme Neoklasik lebih berorientasi sistemik. Secara sederhana hubungan antara faktor eksternal, faktor internal dan kebijakan luar negeri dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 1: Hubungan antar variabel dalam Teori Realisme Neoklasik

Struktur internasional sering dipahami sebagai suatu hirarki yang terdapat dalam hubungan negara-negara. Secara ringkas struktur internasional dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu unipolar, bipolar, dan multipolar. Struktur unipolar merupakan kondisi dimana hanya terdapat

satu negara adikuasa yang paling berpengaruh diantara negara-negara lainnya. Sementara dalam struktur bipolar terdapat dua negara adikuasa, dan lebih dari dua atau banyak negara adikuasa dalam struktur multipolar. Struktur internasional ini, menurut William D. Coplin, nantinya akan menentukan posisi suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Sesuai dengan teori Realisme Neoklasik, sebagai variabel independen, struktur internasional akan mempengaruhi politik domestik, dimana politik domestik ini, yang merupakan variabel antara, nantinya akan mempengaruhi variabel dependen, yaitu politik luar negeri yang diambil oleh suatu negara.

Dengan mengacu pada pemaparan teori Realisme Neoklasik, penelitian ini menghasilkan hipotesa bahwa tidak berubahnya politik luar negeri Mesir terhadap AS di bawah kepemimpinan Presiden Mohammad Mursi dipengaruhi oleh bipolaritas dan unipolaritas struktur internasional yang menempatkan AS sebagai negara adidaya, dimana struktur internasional ini berdampak pada posisi Mesir sebagai negara penyangga perdamaian di Timur Tengah, yang mengharuskan Mesir untuk tidak bersikap agresif terhadap Israel. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada dinamika politik domestik Mesir berupa pertentangan antara kelompok Islamis-Militer dengan kelompok Liberal-Sekuler yang menjadi faktor penentu Mursi dalam mengambil kebijakan.

Polaritas Struktur Internasional dan Posisi Mesir Sebagai Negara Penyangga Perdamaian di Kawasan

Dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tidak berubahnya politik luar negeri Mesir di era Mursi terhadap AS dipengaruhi oleh bipolaritas struktur internasional pada masa Perang Dingin yang pada perkembangannya menentukan posisi Mesir sebagai negara yang

memainkan peran dalam menyangga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Posisi Mesir di kawasan ini nantinya akan mempengaruhi dinamika politik domestik Mesir, terutama pada masa Muhammad Mursi.

Bipolaritas struktur internasional pada masa Perang Dingin yang menempatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya, mengharuskan Mesir untuk memilih arah keberpihakan politik luar negerinya, apakah berpihak pada Uni Soviet atau Amerika Serikat. Selama masa kepemimpinan Gamal Abdul Nasser, Mesir cenderung mengarahkan politik luar negerinya untuk berpihak pada Uni Soviet. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah, yang berdiri sejak tahun 1948. Keberadaan Israel memicu kemarahan negara-negara Arab, terutama Mesir yang senantiasa menjadi pelopor bagi negara-negara Arab lain dalam menentang berdirinya Israel. Penentangan terhadap Israel ini tidak dapat dilepaskan dari nasionalisme Arab yang dirintis oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, dan berdampak pada pecahnya Perang Arab-Israel sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun-tahun 1948, 1967, dan 1973 (Sihbudi, 2005).

Kebijakan dari Nasser ini mendapatkan dukungan dari Uni Soviet yang saat itu berkepentingan memperluas pengaruh ideologi komunisnya ke Timur Tengah. Dukungan dari Soviet tersebut tampak dari adanya perjanjian persahabatan Mesir-Uni Soviet pada 1967 yang mengharuskan Uni Soviet memberikan bantuan militer kepada Mesir, dimana hal ini membuat Mesir menjadi semakin agresif terhadap Israel yang berujung pecahnya Perang Arab-Israel pada 1973. Perang itu sendiri pada akhirnya berhasil dimenangi oleh Israel. Pasca kekalahan dalam Perang Arab-Israel pada 1973, Mesir yang berada di bawah kepemimpinan Anwar Sadat mulai bersikap lunak terhadap Israel. Sikap tersebut tentunya membawa konsekuensi pada berubahnya arah keberpihakan politik luar negeri Mesir yang mulai condong untuk mendekat

pada Amerika Serikat. Hal ini semakin terlihat jelas ketika Mesir mengambil kebijakan untuk mengakhiri perjanjian persahabatan dengan Uni Soviet pada 1976, untuk kemudian berpaling ke negara-negara Barat. Berpalingnya Mesir ke Barat juga tidak bisa dilepaskan dari upaya negara-negara Barat, terutama AS dalam memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab, pasca embargo tahun 1973. Salah satu alasan yang membuat Mesir bersedia berkompromi dengan Israel, yang secara langsung berdampak pada membaiknya hubungan Mesir dengan negara-negara Barat, ialah keinginan Mesir untuk mendapatkan kembali wilayah Sinai yang jatuh ke tangan Israel pada perang 1967.

Sikap kompromi Mesir terhadap Israel dapat dilihat dari kunjungan Presiden Anwar Sadat ke Israel pada 1977. Dalam kunjungan tersebut, Sadat berbicara di depan parlemen Israel mengenai pentingnya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah setelah negara-negara Arab dan Israel berkali-kali berperang memperebutkan wilayah. Kunjungan Sadat tersebut berdampak pada membaiknya hubungan Mesir dengan Israel yang ditandai dengan kesepakatan kedua negara untuk menandatangani perjanjian per-damaian Mesir-Israel di tahun 1979. Keputusan Mesir menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel ini membuat negara tersebut menjadi yang pertama di antara negara-negara Arab yang mengakui kedaulatan Israel. Hal tersebut membuat Mesir dikeluarkan dari Liga Arab pada tahun yang sama.

Perjanjian perdamaian tahun 1979 telah membuat Mesir menjadi negara yang berperan sebagai penyangga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Peran tersebut secara langsung berpengaruh pada hubungan luar negeri Mesir dengan negara-negara lain di luar kawasan Timur Tengah. Sejak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, negara-negara Barat, terutama AS, melihat Mesir sebagai negara yang memainkan peran kunci dalam perdamaian kawasan Timur Tengah. Barat tidak lagi memandang

Mesir sebagai negara agresif yang senantiasa mengobarkan perang di kawasan. Perdamaian kawasan yang dimaksud oleh AS dalam hal ini ialah ketiadaan serangan yang ditujukan terhadap Israel oleh negara-negara Arab. Penandatanganan perjanjian perdamaian 1979 juga berdampak pada posisi Mesir di dunia internasional yang pada saat itu diwarnai oleh Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel, Mesir secara tidak langsung menunjukkan keberpihakannya terhadap AS (Sid-Ahmed, 1987).

Penandatanganan perjanjian perdamaian tahun 1979 juga berdampak pada perbaikan hubungan antara Mesir dengan AS yang sebelumnya sempat memanas selama masa kepemimpinan Nasser dan awal pemerintahan Sadat. Lebih jauh lagi, perjanjian yang menandai akhir dari Perang Arab-Israel tersebut telah membuat kedua negara saling bergantung satu sama lain. Bagi kedua negara perjanjian perdamaian tahun 1979 memiliki arti penting. Khususnya bagi AS, perjanjian perdamaian 1979 merupakan jaminan keamanan bagi Israel. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Israel merupakan sekutu utama AS di kawasan Timur Tengah. Salah satu agenda politik luar negeri utama AS ialah mendukung dan melindungi kepentingan Israel sehingga perjanjian perdamaian 1979 dengan demikian merupakan hal yang sangat penting bagi AS.

Perjanjian perdamaian 1979 penting bagi AS karena ia merupakan alat untuk mencegah terjadinya serangan negara-negara Arab terhadap Israel. Jauh sebelum penandatanganan perjanjian 1979, Israel selalu terlibat langsung dalam peperangan dengan negara-negara Arab. Tiga kali perang antara Israel dan negara-negara Arab secara umum disebabkan oleh ketidaksetujuan negara-negara Arab atas berdirinya Israel. Di antara negara-negara Arab yang terlibat perang dengan Israel, Mesir memiliki pengaruh paling besar. Besarnya pengaruh Mesir terlihat dari sikap negara tersebut yang selalu mengajak

negara-negara Arab lain melakukan serangan terhadap Israel sejak 1948 (Sihbudi, 2005). Dengan kata lain, Mesir merupakan pemimpin dari negara-negara Arab dalam peperangan dengan Israel. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perdamaian 1979 memberikan jaminan keamanan bagi Israel dari serangan negara-negara Arab.

Selain sebagai alat perlindungan terhadap Israel, bagi AS perjanjian perdamaian 1979 juga berfungsi untuk menjaga keberpihakan Mesir terhadap blok Barat selama masa Perang Dingin. Ini penting mengingat Mesir sempat menjalin kerja sama dengan Uni Soviet pada kurun waktu 1971 hingga 1976 (Porter, 2016). Atas dasar tersebut, AS berupaya untuk mengkondisikan Mesir agar tetap mematuhi perjanjian perdamaian 1979. Upaya yang dilakukan oleh AS ialah dengan memberikan bantuan dana kepada Mesir sebesar \$2 milyar setiap tahun, yang mencakup bantuan dalam bidang ekonomi dan militer. Bantuan dana tersebut terus berlangsung hingga sekarang, membuat Mesir menjadi negara penerima bantuan AS terbesar kedua di Timur Tengah setelah Israel.

Mesir juga mempunyai kepentingan dalam menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel tahun 1979. Alasan utama Mesir menandatangani perjanjian tersebut ialah untuk mendapatkan kembali wilayah gurun Sinai yang jatuh ke tangan Israel dalam perang tahun 1967 (Sihbudi, 2005). Selain itu, Mesir juga memperoleh bantuan dana setiap tahun dari AS atas kesediaannya menyepakati perjanjian perdamaian dengan Israel. Keputusan Mesir dalam menyepakati perjanjian perdamaian dengan Israel menimbulkan kontroversi, baik dari dalam negeri maupun dari sesama negara Arab. Dari dalam negeri, penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Israel menimbulkan reaksi keras dari gerakan-gerakan Islam yang turut menyokong rezim Anwar Sadat. Sedangkan dari negara-negara Arab, sikap Mesir tersebut membuat mereka bersepakat untuk mengeluarkan Mesir dari

keanggotaan Liga Arab. Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, Mesir memilih untuk tetap konsisten dalam keputusannya menyepakati dan mematuhi perjanjian perdamaian dengan Israel. Dengan demikian, Mesir maupun AS sama-sama saling bergantung dalam memenuhi kepentingan nasional masing-masing.

Hubungan interdependen Mesir dan AS terus berlanjut pada masa pemerintahan Husni Mubarak. Sebagaimana pada akhir pemerintahan Anwar Sadat, Mesir di bawah kepemimpinan Mubarak memutuskan untuk tetap mematuhi perjanjian perdamaian dengan Israel. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan serangan yang dilakukan oleh Mesir terhadap Israel dan juga peran Mesir sebagai negara penyangga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Peran tersebut dapat dilihat, antara lain, dari kesediaan Mubarak dalam memediasi konflik yang melibatkan Israel dan Palestina yang berlangsung pada Desember 2008 hingga Januari 2009 (Harris, 2009).

Bagi AS, sikap Mesir selama masa kepemimpinan Mubarak tersebut merupakan suatu kemajuan, mengingat pada masa Nasser dan Sadat (sebelum menandatangani perjanjian), Mesir senantiasa melakukan serangan militer terhadap Israel. Kepatuhan Mesir terhadap perjanjian perdamaian dengan Israel juga berdampak pada terjaganya hubungan baik Mesir dengan AS. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan Mesir yang senantiasa mendukung AS, seperti keputusan untuk turut bergabung dengan AS dalam operasi militer di Somalia pada tahun 1991 dan menjadi bagian upaya penciptaan perdamaian di Bosnia pada pertengahan tahun 1990-an (Porter, 2016). Atas konsistensi sikap Mesir dalam mematuhi perjanjian perdamaian 1979 dan menjaga hubungan baik dengan AS, maka AS tetap memberikan bantuan dana tiap tahun terhadap Mesir selama era Husni Mubarak.

Semakin eratnya hubungan baik Mesir dengan AS pada masa Husni Mubarak juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur internasional

pasca Perang Dingin yang menempatkan AS sebagai satu-satunya negara adidaya. Hal ini tentunya membuat AS dapat secara leluasa memainkan perannya di kawasan Timur Tengah, terutama dengan terus menjaga agar Mesir terus menjadi negara penyangga perdamaian di kawasan, dengan tetap konsisten memberikan bantuan dana kepada Mesir. Bagi rezim Mubarak, terjaganya hubungan baik dengan AS merupakan suatu keuntungan karena *reward* bantuan dana ekonomi dan militer dari AS dapat dipergunakan untuk memperkuat stabilitas politik dalam negeri Mesir. Unipolaritas struktur internasional pasca Perang Dingin dengan demikian semakin memperkuat posisi Mesir sebagai negara penyangga perdamaian (*buffer state*) di kawasan Timur Tengah.

Rezim Mubarak berakhir pada Februari 2011. Tidak lama setelah itu, pemerintahan Mesir diambil alih oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (*Supreme Council of the Armed Forces, SCAF*) hingga terselenggaranya pemilu guna menentukan komposisi parlemen dan memilih presiden. Di bawah kendali SCAF, hubungan luar negeri Mesir dengan AS tidak mengalami perubahan, sebagaimana pada masa Mubarak. Kekuasaan SCAF berakhir pada 30 Juni 2012, ketika Mohammad Mursi secara resmi menjabat sebagai Presiden Mesir. Di bawah kepemimpinan Mursi, AS sempat mengkhawatirkan perubahan politik luar negeri Mesir, mengingat Presiden Mursi berasal dari Ikhwanul Muslimin yang dikenal keras terhadap Israel dan berseberangan dengan AS. Hal ini terlihat dari adanya wacana penghentian bantuan luar negeri AS terhadap Mesir yang diajukan oleh Kongres pasca kemenangan Mursi dalam pemilu presiden (Sharp, 2012).

Menariknya, politik luar negeri Mesir terhadap AS di era kepemimpinan Mohammad Mursi ternyata tidak mengalami perubahan. Hal tersebut terlihat ketika Presiden Mursi menyatakan komitmennya untuk tetap menjalin hubungan baik dengan AS, meskipun pada saat yang bersamaan ia juga

memperbaiki hubungan diplomatik dengan Iran serta memperkuat hubungan dengan Cina, suatu hal yang tidak dilakukan oleh Mubarak. Komitmen Mesir dalam menjaga hubungan baik dengan AS semakin terlihat jelas ketika Mesir, yang diwakili oleh Presiden Mursi, bersedia menjadi mediator dalam konflik Israel-Hamas pada tahun 2012 (Kouddous, 2012). Kesediaan Mursi dalam memediasi konflik ini juga menunjukkan peran Mesir sebagai negara penyangga perdamaian di Timur Tengah.

Upaya mediasi yang dilakukan oleh Mursi pada akhirnya menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada 22 November 2012. Atas sikapnya tersebut, Mursi mendapatkan berbagai pujian dari negara-negara lain, terutama AS. Ini dapat dilihat dari ucapan terima kasih Barack Obama yang ditujukan kepada Mursi sesaat setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kesediaan Mursi menjadi mediator konflik Israel dan Hamas merupakan sebuah ironi mengingat sebelumnya Ikhwanul Muslimin senantiasa mendukung Hamas dalam perjuangan melawan Israel. Sikap Mesir ini menunjukkan bahwa ia memilih untuk tetap memainkan peran sebagai negara penyangga perdamaian di Timur Tengah. Hal tersebut berkaitan erat dengan politik luar negeri Mesir di era Mursi yang berorientasi pada penegasan kepemimpinan Mesir di kawasan Timur Tengah (Grimm & Roll, 2013). Upaya mediasi konflik Israel-Hamas merupakan salah satu upaya Mursi dalam menjalankan visi politik luar negeri tersebut.

Upaya Mesir dalam menegaskan kepemimpinannya di kawasan Timur Tengah juga terlihat dari tindakan negara tersebut dalam menyikapi krisis internal Suriah. Presiden Mursi senantiasa mendukung kelompok oposisi Suriah dalam menumbangkan rezim Bashar Al-Assad. Mesir memandang bahwa sumber kekacauan internal Suriah yang tidak kunjung usai merupakan akibat dari ketidakmampuan Presiden Bashar Al-Assad dalam

mencegah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat pemerintahannya. Alasan lain yang dapat menjelaskan mengapa Mesir di bawah rezim Mursi mendukung oposisi Suriah ialah karena pemerintahan Mursi diisi oleh orang-orang yang sebelumnya menentang rezim Husni Mubarak yang telah lama berkuasa dan dinilai otoriter. Ini serupa dengan apa yang hingga kini dilakukan oleh oposisi Suriah dalam upaya mereka untuk menurunkan Bashar Al-Assad. Oleh karena itu, Mesir menyetujui usulan PBB agar Presiden Bashar Al-Assad diajukan ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. Lagi, sikap Mesir tersebut menunjukkan bahwa ia tetap berupaya menjadi negara yang berperan sebagai penyangga perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Dalam kasus konflik internal Suriah, sikap yang diambil oleh Mesir menjadi indikator bahwa perdamaian kawasan yang diupayakan oleh Mesir tidak hanya sebatas perdamaian antara Israel dan Palestina, tetapi juga perdamaian di negara yang sedang mengalami konflik internal. Hal ini sekaligus memperlihatkan upaya Mesir dalam menegaskan kepemimpinannya di kawasan Timur Tengah. Upaya Mesir tersebut semakin terlihat ketika Presiden Mursi memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah pada 15 Juni 2013 (Kuncahyono, 2013). Mesir menjadi satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang mengambil langkah pemutusan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Bashar Al-Assad dalam menyikapi krisis internal Suriah.

Sikap Mesir yang menonjolkan perannya sebagai negara penyangga perdamaian di kawasan Timur Tengah sekali lagi berpengaruh pada hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain di luar kawasan, terutama AS. Hal ini terlihat dari sikap AS yang juga senantiasa menyerukan turunnya Bashar Al-Assad guna mengakhiri konflik internal Suriah. Hubungan antara AS dengan Suriah sendiri dapat dikatakan tidak harmonis

sejak Suriah dipimpin oleh ayah Bashar, Hafez Al-Assad. Kekakuan hubungan tersebut disebabkan oleh kebijakan Hafez Al-Assad yang memilih untuk berpihak pada Uni Soviet selama masa Perang Dingin. Dengan berpihak kepada Uni Soviet, Suriah secara langsung mencitrakan diri sebagai negara anti-Barat. Sikap anti-Barat tersebut dalam perkembangannya tetap berlanjut pasca berakhirnya Perang Dingin.

Krisis internal Suriah merupakan momentum bagi AS untuk menumbangkan rezim Al-Assad yang anti-Barat. Dengan alasan penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi, AS menuntut agar Presiden Bashar Al-Assad mengundurkan diri karena ia dinilai bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama konflik internal Suriah. Lebih jauh dari itu, AS, melalui Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, secara tegas menyatakan bahwa Presiden Bashar Al-Assad telah kehilangan legitimasi dan tidak pantas untuk tetap memimpin Suriah. Pernyataan tersebut diikuti oleh pengakuan terhadap Dewan Nasional Suriah sebagai perwakilan resmi Suriah di dunia internasional. Selain mengakui Dewan Nasional Suriah, AS juga mendanai serangkaian pertemuan kelompok ini dalam usaha mereka untuk merumuskan proses transisi kepemimpinan di Suriah (Kuncahyono, 2013).

Buruknya hubungan Suriah dengan AS secara langsung juga berdampak pada hubungan Suriah dengan Mesir. Suriah dan Mesir sendiri pada awalnya merupakan dua negara yang memiliki hubungan erat;keduanya sama-sama menentang berdirinya Israel. Mesir dan Suriah bahkan pernah membentuk Republik Arab Bersatu pada tahun 1958 sebagai langkah mempersatukan bangsa Arab (Sihbudi, 2005). Hubungan antara kedua negara memburuk setelah Mesir menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada 1979. Sejak saat itu, Mesir tidak lagi mendukung Suriah dalam menolak keberadaan Israel.

Posisi Mesir sebagai negara yang berperan sebagai penyangga perdamaian di Timur Tengah dengan demikian memiliki pengaruh terhadap sikap negara tersebut yang sejalan dengan AS dalam menanggapi konflik Israel-Hamas dan krisis internal Suriah. Hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap tidak berubahnya politik luar negeri Mesir terhadap AS, meskipun Mesir dipimpin oleh Presiden Mohammad Mursi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin. Sesuai dengan teori Realisme Neoklasik, bipolaritas struktur internasional pada masa Perang Dingin dan struktur Unipolar pasca Perang Dingin – yang menempatkan AS sebagai negara adidaya, yang menentukan posisi Mesir sebagai negara penyangga perdamaian di Timur Tengah merupakan variabel independen yang kemudian mempengaruhi dinamika politik domestik Mesir yang merupakan variabel antara. Dinamika politik dalam negeri ini dalam perkembangannya berpengaruh pada keputusan Muhammad Mursi untuk tidak mengubah politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat sekalipun ia disokong oleh Ikhwanul Muslimin.

Politik Domestik Mesir: Islamis-Militer vs Liberal Sekuler

Sebagaimana telah dijelaskan, sejak menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel di tahun 1979 Mesir telah berubah dari negara yang sebelumnya bersikap agresif dan senantiasa mengajak negara-negara Arab lain untuk memerangi Israel, menjadi negara yang menerima keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah. Normalisasi hubungan Mesir dengan Israel berdampak pada membaiknya hubungan luar negeri Mesir dengan AS, setelah sebelumnya hubungan kedua negara sempat tegang akibat Mesir bekerja sama dengan Uni Soviet pada periode 1971 hingga 1976. Hubungan baik Mesir dengan AS terus berlangsung ketika Mesir berada di bawah kepemimpinan Husni Mubarak.

Rezim Husni Mubarak berakhir pada 2011 dan digantikan oleh Mohammad Mursi pada Juni 2012. Di bawah kepemimpinan Mursi, politik luar negeri Mesir terhadap AS masih tetap konsisten sebagaimana pada masa Mubarak. Keharmonisan hubungan antara kedua negara semakin tampak jelas ketika AS tetap memberlakukan kebijakan pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada Mesir di bawah kepemimpinan Mursi (Sharp, 2012). Selain itu, hubungan baik antara Mesir dengan AS juga terlihat dari kesamaan sikap kedua negara dalam merespon konflik Israel-Hamas dan krisis internal Suriah. Meskipun demikian, sikap yang diambil Mesir dalam merespon konflik Israel-Hamas dan krisis internal Suriah ternyata menimbulkan berbagai respon dari dalam negeri Mesir.

Dalam kasus konflik Israel-Hamas, Mursi mesti menghadapi penentangan dari Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Ini dapat dilihat dari pernyataan Mohammad Badei, salah seorang tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin yang mengecam upaya perdamaian dengan Israel dan menyerukan perang suci guna membebaskan wilayah Palestina. Adapun dari kelompok Salafi, ketidaksetujuan mereka atas gencatan senjata Israel dan Hamas disebabkan karena mereka memiliki afiliasi langsung dengan kelompok Salafi yang berada di Palestina yang sejak awal pecahnya konflik antara Israel dengan Hamas telah menyatakan keengganannya untuk berdamai dengan Israel (Kuncahyono, 2013).

Keputusan Mursi yang bersedia menjadi mediator dalam konflik Israel-Hamas telah berdampak pada terjadinya perpecahan di kalangan kelompok Islamis, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Akan tetapi, Mursi segera bertindak cepat agar perpecahan tersebut tidak semakin membesar. Upaya yang dilakukan Mursi ialah dengan memberikan porsi kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok Islamis, yaitu dengan menyingkirkan sisa-sisa pendukung rezim Mubarak. Guna mewujudkan tujuan itu, Mursi membuat

keputusan yang kontroversial, yaitu mengeluarkan dekrit pada 22 November 2012. Dekrit tersebut memerintahkan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi parlemen yang didominasi oleh FJP, menugaskan FJP untuk membuat konstitusi baru, serta melindungi dan memberikan wewenang baru kepada presiden untuk memecat jaksa agung. Perintah yang diberikan Mursi dalam dekrit menunjukkan bahwa ia memang berniat untuk memberikan porsi kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok Islamis yang menaikkannya sebagai Presiden. Agar rencananya tersebut berjalan mulus, dalam dekrit tersebut Mursi bahkan menegaskan bahwa semua keputusan yang ia ambil tidak dapat diganggu-gugat secara hukum hingga pemilu menghasilkan parlemen yang baru (Kuncahyono, 2013).

Dekrit Presiden Mursi menimbulkan beragam reaksi. Kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi mendukung keputusan Mursi tersebut, sedangkan kelompok lain seperti Fron Nasional dan para pendukung rezim Mubarak menentang dekrit yang mereka nilai sebagai upaya menjadikan Mesir sebagai negara Islam. Tidak lama setelah dekrit tersebut diterbitkan, masyarakat dan kelompok yang menentang keberadaan dekrit melakukan demonstrasi di Alun-alun Tahrir, Kairo, dan diikuti segera oleh kota-kota lain. Mereka menuding Mursi sebagai diktator baru pengganti Husni Mubarak. Meskipun Mursi berdalih bahwa dekrit tersebut ia keluarkan untuk melindungi revolusi, kehidupan bangsa, persatuan, dan kesatuan nasional, ia juga dituding berupaya menumpuk kekuasaan. Selain itu, Mursi berjanji akan melepaskan semua kekuasaan setelah konstitusi baru disusun dan disahkan. Namun, kelompok penentang dekrit tidak menerima begitu saja alasan Mursi (Kuncahyono, 2013). Sejak saat itu demonstrasi anti-Mursi terus bermunculan sampai pelaksanaan referendum konstitusi pada 15 Desember 2012.

Upaya Mursi dalam menyingkirkan sisa-sisa pendukung rezim Mubarak dengan memberikan peran lebih besar kepada FJP melalui

penerbitan dekrit ternyata menimbulkan perpecahan antara kelompok Islamis dengan kelompok liberal-sekuler yang sebelumnya bersatu dalam pemilihan presiden guna memenangkan Mursi (Kuncahyono, 2013). Perlawanan dari kelompok liberal-sekuler yang memiliki massa lebih besar dibandingkan kelompok Islamis dinilai mampu menjatuhkan pemerintahan Mursi dalam waktu dekat. Akan tetapi, pemerintahan Mursi ternyata masih tetap bertahan di tengah berbagai demonstrasi dan tuntutan mundur dari pihak oposisi. Faktor utama yang membuat Mursi dapat bertahan dalam kondisi tersebut ialah keberpihakan pihak militer. Sikap militer yang berpihak pada pemerintahan Mursi merupakan hasil dari strategi Mursi dalam mengganti posisi-posisi kunci di tubuh militer yang diisi oleh orang-orang pilihannya (Kuncahyono, 2013).

Militer Mesir dengan demikian memainkan peran besar dalam menentukan hasil akhir dari perseteruan antara kelompok Islamis yang mendominasi pemerintahan dengan kelompok liberal-sekuler yang memiliki banyak massa pendukung. Peran militer dalam politik Mesir sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Sejarah modern Mesir menceritakan bahwa tentara selalu menjadi penjamin keamanan negara dan bangsa di saat krisis. Ini dapat dilihat dari tahun 1952, ketika sekelompok perwira militer Mesir yang menamai dirinya sebagai Perwira Bebas, melakukan kudeta terhadap Raja Farouk (Basyar, 1988). Tindakan Perwira Bebas tersebut didasari oleh terdapatnya konflik antara organisasi politik Al-Wafd dengan Raja Farouk yang berakibat pada terbengkalainya permasalahan dalam negeri dan memicu keresahan rakyat Mesir. Sejak saat itu, Mesir berada dalam kekuasaan militer yang sangat konservatif dan menentang perubahan (Basyar, 1988).

Dominasi militer dalam kekuasaan Mesir sempat berakhir ketika Husni Mubarak diturunkan pada 2011 melalui jalan revolusi. Meskipun demikian,

kejatuhan Mubarak tidak lantas mematikan peran militer dalam politik Mesir. Dalam proses panjang penggulingan rezim Husni Mubarak, militer Mesir ternyata turut ikut serta mendukung para demonstran. Keikutsertaan militer Mesir ini dilandasi oleh kepentingan untuk mencegah naiknya Gamal Mubarak, yang menganut paham ekonomi liberal, sebagai presiden. Dalam kalkulasi kelompok militer, bila pada akhirnya Gamal berkuasa, maka yang pertama-tama terancam ialah bisnis yang dikelola secara monopolistik oleh militer (Kuncahyono, 2013).

Peran besar militer dalam menurunkan Husni Mubarak semakin tampak jelas ketika SCAF mengadakan sidang pada 10 Februari 2011 tanpa kehadiran Mubarak yang juga komandan tertinggi militer Mesir. Tindakan SCAF ini secara langsung memperlihatkan bahwa mereka tidak lagi mengakui Mubarak sebagai Presiden Mesir. Ini tampak dari pernyataan seorang anggota SCAF yang belakangan menjelaskan bahwa pengambilalihan komando oleh Angkatan Bersenjata melalui penyelenggaraan sidang SCAF pada 10 Februari 2011 merupakan bentuk pengakuan militer terhadap tuntutan rakyat Mesir (Kuncahyono, 2013). Pada hari berikutnya, 11 Februari 2011, rakyat yang didukung militer akhirnya berhasil menurunkan Presiden Husni Mubarak setelah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Militer Mesir dengan demikian memiliki peran besar dalam memaksa Husni Mubarak untuk menanggalkan jabatannya.

Pasca turunnya Mubarak, SCAF mengambil alih pemerintahan Mesir. Selain sebagai pengisi kekuasaan sementara, SCAF juga bertugas menyelenggarakan pemilu guna menentukan kembali komposisi parlemen serta memilih presiden baru pengganti Mubarak (Kuncahyono, 2013). Tugas SCAF berakhir ketika Mohammad Mursi resmi menjabat sebagai Presiden Mesir pada 30 Juni 2012 setelah sebelumnya memenangi pemilihan presiden. Pada awal pemerintahannya, Mursi sempat menyatakan bahwa meskipun

berasal dari Ikhwanul Muslimin, ia merupakan presiden bagi seluruh rakyat Mesir dan akan berdiri di tengah-tengah mereka. Ketika itu, munculnya Mursi sebagai presiden sipil pertama Mesir memberikan harapan baru bagi rakyat Mesir yang menginginkan situasi yang lebih baik dibandingkan dengan rezim Mubarak yang dinilai otoriter (Kuncahyono, 2013). Tetapi, harapan itu sirna ketika Mursi mengeluarkan dekrit Presiden pada 22 November 2012 yang memberikan kewenangan penuh kepada kelompok Islam dalam proses penyusunan konstitusi baru. Seperti telah diuraikan, dekrit tersebut mendapat penentangan dari kelompok liberal-sekuler yang memicu terjadinya berbagai demonstrasi.

Dalam situasi yang kacau, militer Mesir sekali lagi berperan besar dalam menentukan bertahan atau tidaknya seorang presiden untuk tetap menduduki jabatannya. Berbeda dengan saat revolusi 2011, di mana ketika itu militer Mesir berpihak terhadap demonstran anti-Mubarak, pasca terbitnya dekrit yang memicu demonstrasi anti-Mursi militer Mesir justru cenderung berpihak pada pemerintahan Mursi. Keberpihakan tersebut dapat dilihat dari sikap netral yang diambil oleh militer dalam menyikapi konflik antara kelompok pendukung dan penentang dekrit. Pada 8 Desember 2012, misalnya, militer menegaskan bahwa mereka terus memantau dan mengikuti perkembangan situasi dalam negeri terkini dengan penuh keprihatinan. Selain itu, militer juga menyatakan bahwa mereka akan tetap bertugas untuk mengamankan dan melindungi institusi-institusi publik.

Sikap netral militer yang dimaknai sebagai keberpihakan terhadap pemerintahan Mursi ini menarik. Dalam kasus-kasus serupa yang terjadi sebelumnya (tahun 1952 dan 2011), militer senantiasa turut campur tangan yang pada akhirnya selalu berujung pada pergantian rezim. Jika mengacu kepada dua peristiwa tersebut, seharusnya militer Mesir turut memberikan dukungan terhadap kelompok anti-Mursi dan mengambil alih kekuasaan

guna menciptakan situasi yang kondusif. Pada kenyataannya militer Mesir hanya menyatakan sikap netral mereka dalam menyikapi kekacauan internal yang diakibatkan oleh dekrit Presiden Mursi. Sikap netral militer dengan demikian dapat dikatakan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pemerintahan Mursi.

Selain hanya bersikap netral dalam konflik antara pendukung dan penentang dekrit, keberpihakan militer terhadap pemerintahan Mursi juga terlihat dari tindakan militer yang justru memberikan saran kepada Mursi untuk mengadakan dialog dengan kelompok penentang dekrit. Lebih dari itu, pada 11 Desember 2012, militer, melalui Kepala Angkatan Bersenjata Abdel Fattah al-Sisi, menyerukan agar diadakan pertemuan persatuan nasional yang melibatkan semua pihak. Ajakan al-Sisi itu diajukan setelah situasi semakin memburuk dan perpecahan nasional tampak semakin mendekati kenyataan sebagai akibat terbitnya Dekrit Presiden. Namun, berbagai saran dari militer ini tidak dilaksanakan oleh pemerintahan Mursi. Presiden Mursi bahkan menyelenggarakan dialog sendiri yang hanya dihadiri oleh kelompok pendukung Mursi (Kuncahyono, 2013). Meskipun demikian, sampai titik ini pemerintahan Mursi masih tetap bertahan; militer Mesir sama sekali tidak bereaksi apa pun atas sikap yang diambil oleh pemerintahan Mursi.

Sikap militer Mesir yang terkesan lunak terhadap pemerintahan Mursi menunjukkan bahwa strategi Mursi dengan menempatkan orang-orang pilihannya di tubuh militer berjalan dengan baik. Namun, semua itu menjadi berbalik ketika Mursi akhirnya dikudeta oleh militer di bawah pimpinan Kepala Angkatan Bersenjata Abdel Fattah al-Sisi pada 3 Juli 2013. Abdel Fattah al-Sisi beranggapan bahwa kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir adalah imperatif karena Mursi telah kehilangan kepercayaan dari rakyat Mesir. Selain itu, militer juga menilai bahwa Mursi memiliki andil dalam mendorong pecahnya kerusuhan sektarian terhadap kelompok Syiah dan Alawite yang

ada di Mesir, setelah ia dianggap turut ambil bagian dalam demonstrasi pro-oposisi Suriah dengan menyatakan bahwa bangsa dan tentara Mesir tidak akan meninggalkan rakyat Suriah (Kuncahyono, 2013).

Tindakan militer meng kudeta Mursi sangat kontras dengan apa yang pernah mereka lakukan ketika Mursi mengeluarkan Dekrit Presiden pada 22 November 2012. Jika al-Sisi beralasan bahwa Mursi tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari rakyat Mesir, maka seharusnya ia meng kudeta Mursi tidak lama setelah presiden yang disokong oleh FJP tersebut mengeluarkan dekrit, karena sebagian besar rakyat Mesir pada saat itu telah kehilangan kepercayaan kepada Mursi. Demikian pula jika al-Sisi memakai perpecahan nasional sebagai alasan kudeta yang ia lakukan, seharusnya al-Sisi pun cepat turun tangan dengan mengambil alih pemerintahan sejak terbitnya dekrit, karena keberadaan dekrit telah menyebabkan perpecahan antara kelompok Islamis dan kelompok liberal-sekuler. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan orang-orang pilihan Mursi di dalam tubuh militer bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab sikap lunak militer terhadap Mursi ketika ia mengeluarkan Dekrit Presiden.

Faktor lain dari keberpihakan militer terhadap pemerintahan Mursi yang membuatnya bertahan di tengah berbagai demonstrasi dan tuntutan mundur dari pihak oposisi pasca terbitnya dekrit ialah kebijakan Mursi menaikkan anggaran belanja militer. Di tengah kondisi perekonomian Mesir yang tidak stabil pasca revolusi, tentu sulit untuk membayangkan bagaimana Mursi mampu memperoleh dana besar agar anggaran belanja militer dapat ia naikkan. Guna mewujudkan kebijakan tersebut, Mursi membuat keputusan dengan tidak mengubah politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat sebagaimana pada masa Husni Mubarak. Langkah yang diambil Mursi tersebut disebabkan karena AS merupakan negara penyumbang dana

terbesar bagi Mesir sejak 1979. Dengan tetap menjaga hubungan baik dengan AS, maka Mursi akan tetap memperoleh bantuan dana setiap tahunnya dari AS. Upaya Mursi dalam menjaga konsistensi politik luar negeri dengan AS terlihat ketika dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ia menyatakan bahwa Mesir tidak akan mengubah politik luar negerinya secara drastis, khususnya terhadap Amerika Serikat (Ottaway, 2016). Selain itu, Mursi juga menyatakan bahwa Mesir tidak akan membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel yang berlaku sejak 1979. Keputusan Mursi dalam menjaga konsistensi politik luar negeri Mesir terhadap AS membuat Mesir tetap menerima bantuan dana, walaupun berkurang jumlahnya dari \$2 milyar menjadi \$1,3 milyar, dari AS (Sharp, 2012). Dana tersebut membantu Mursi untuk merangkul militer agar melindungi kekuasaannya sampai akhirnya ia dikudeta.

Dalam konteks politik domestik, tidak berubahnya politik luar negeri Mesir terhadap AS pada era Mursi dengan demikian merupakan bagian dari strategi Mursi dalam upaya merangkul militer Mesir guna mempertahankan kekuasaannya. Meskipun Mursi disokong oleh Ikhwanul Muslimin yang secara ideologi bertentangan dengan AS, ternyata hal itu tidak mempengaruhi kebijakannya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan AS. Kebijakan Mursi bahkan juga bertujuan untuk memuluskan rencana pemberian porsi kekuasaan yang lebih besar bagi Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahannya. Ini menunjukkan bahwa IM ternyata telah mengalami pergeseran metode dan tujuan, dari gerakan yang awalnya bertujuan memberi penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya nilai keislaman melalui promosi hukum-hukum, nilai-nilai, dan moral Islam (Iqbal & Nasution, 2010), menjadi gerakan yang berorientasi pada pencapaian kekuasaan dengan menggunakan segala cara, termasuk bekerja sama dengan AS. Perubahan orientasi terlihat ketika gerakan Islam yang didirikan oleh Hassan Al-Banna tersebut membuat kesepakatan rahasia dengan Amerika Serikat, di mana

AS akan memberikan bantuan kepada Ikhwanul Muslimin sebesar \$8 milyar. Dalam kesepakatan tersebut juga terungkap bahwa Mesir bersedia memberikan 40% wilayah Sinai untuk Palestina untuk meminimalisasi serangan Hamas kepada Israel.

Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak berubahnya politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pasca revolusi 2011, terutama pada masa Muhammad Mursi, dipengaruhi oleh struktur internasional yang bersifat bipolar pada masa Perang Dingin, dimana struktur tersebut membuat Mesir hanya memiliki pilihan untuk berpihak pada AS atau Uni Soviet. Meskipun pada masa Nasser, Mesir cenderung berpihak pada Uni Soviet, sejak masa Anwar Sadat Mesir mengubah arah kebijakannya untuk lebih berpihak pada AS. Hal ini terlihat dari kesediaan Mesir untuk tidak lagi bersikap agresif terhadap Israel yang sekaligus memposisikan Mesir sebagai negara penyangga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sikap Mesir tersebut mendapatkan *reward* dari AS yang sejak perjanjian Camp David 1979, terus memberikan bantuan dana militer dan ekonomi kepada Mesir. Hubungan baik Mesir-AS menjadi semakin erat pada masa pemerintahan Husni Mubarak. Ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari berubahnya struktur internasional dari bipolar menjadi unipolar pada awal 1990-an, yang menjadikan AS sebagai satu-satunya negara adidaya. Hal tersebut memungkinkan AS untuk secara leluasa memainkan perannya di Timur Tengah dengan tetap menjaga Mesir untuk tetap berada pada posisi sebagai negara penyangga perdamaian di kawasan.

Pada masa Mursi, posisi Mesir sebagai penyangga perdamaian di Timur Tengah, sebagai konsekuensi dari bipolaritas struktur internasional pada masa Perang Dingin dan struktur Unipolar setelah Perang Dingin – yang

menempatkan AS sebagai negara adidaya, tetap dipertahankan oleh Mursi. Inilah yang membuat Mesir memiliki kesamaan sikap dengan AS dalam merespon konflik Israel-Hamas dan krisis internal Suriah. Posisi Mesir tersebut pada perkembangannya berpengaruh terhadap dinamika politik dalam negeri Mesir. Ini terlihat dari terdapatnya penentangan dari Ikhwanul Muslimin dan Salafi terkait kesediaan Mursi dalam memediasi konflik Israel dengan Hamas. Guna meredam penentangan tersebut, Mursi berupaya memberikan porsi kekuasaan yang lebih besar bagi IM dan Salafi melalui penerbitan Dekrit Presiden pada 22 November 2012. Dekrit Presiden itu sendiri secara umum berisi mengenai penugasan partai berkuasa FJP dalam menyusun konstitusi baru Mesir.

Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Mursi menimbulkan beragam reaksi. Kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi menjadi pihak yang mendukung keputusan Mursi tersebut. Sedangkan kelompok lain seperti kelompok sekuler-liberal yang terdiri atas partai-partai yang tergabung dalam Fron Penyelamat Nasional dan para pendukung rezim Mubarak menentang keberadaan Dekrit yang mereka nilai sebagai upaya menjadikan Mesir sebagai negara Islam. Terbitnya Dekrit telah menimbulkan pertarungan antara kelompok Islamis yang mendukung Dekrit, dengan kelompok sekuler-liberal yang terus menyuarakan penolakannya terhadap keberadaan Dekrit. Jumlah massa kelompok liberal-sekuler yang lebih besar dibandingkan kelompok Islamis normalnya mampu menjatuhkan pemerintahan Mursi dalam waktu dekat. Akan tetapi, pemerintahan Mursi ternyata masih tetap bertahan, meskipun demonstrasi yang menuntut dirinya untuk mundur terus berlangsung. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Mursi dalam merangkul militer Mesir, yang memiliki peran penting dalam menentukan bertahan tidaknya suatu rezim yang telah kehilangan kepercayaan dari sebagian besar rakyatnya.

Keberpihakan militer Mesir terhadap pemerintahan Mursi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, strategi Mursi dalam mengganti posisi kunci di jajaran militer dengan orang-orang yang ia pilih sendiri, yang ia lakukan tidak lama setelah resmi dilantik sebagai Presiden. Kedua, kebijakan Mursi menaikkan anggaran belanja militer. Guna mewujudkan kebijakannya tersebut, Mursi membuat keputusan dengan tetap menjaga konsistensi politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat. Sikap kooperatif Mesir terhadap AS membuat Mesir menerima bantuan dana sebesar \$1,3 milyar tiap tahun dari AS. Bantuan dana tersebut meliputi bantuan dalam bidang ekonomi dan militer. Kondisi ini membuat Mursi dengan mudah dapat menaikkan anggaran belanja militer.

Saran

Pada penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan alasan tidak berubahnya politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat dengan menggunakan teori Realisme Neoklasik yang berfokus pada struktur internasional sebagai variabel independen dan politik domestik sebagai variabel antara. Dengan kasus yang sama penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya berfokus pada pendekatan *small group theories* yang lebih menekankan pada beberapa kelompok individu yang berperan besar pada faktor berubahnya orientasi politik Ikhwanul Muslimin sebagai payung politik Muhammad Mursi, maupun pendekatan mikro yang lebih menyoroti aspek rasional dan kognitif Muhammad Mursi sebagai pengambil kebijakan. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat melakukan riset mengenai politik luar negeri Mesir pada masa Abdul Fattah El Sisi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ansari, A.M., (2008). *Supremasi Iran: Poros Setan atau Superpower Baru?*. Jakarta: Zahra.
- Arafat A.A. (2005). *The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt*. New York: Palgrave MacMillan.
- Coplin, W.D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- Fischer, M.M.J. (2003), *Iran: From Religious Dipute to Revolution*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press
- Iqbal, M. & Nasution, A.H. (2010). *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kuncahyono, T. (2013). *Tahrir Square: Jantung Revolusi Mesir*. Jakarta: Kompas.
- Sihbudi, R. (2005). *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan.
- Tamburaka, A. (2011). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi.

Artikel Jurnal

- Basyar, M. H. (1988). 'Bagaimana Militer Menguasai Mesir?'. *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 3, no. 3, pp. 85-88.
- Rosyidin, M. (2010/2011). 'Integrasi Struktur dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik', *Global: Jurnal Politik Internasional*, vol. 10, no. 2, pp. 150-163.
- Sid-Ahmed, M. (1987/1988), 'Egypt: The Islamic Issue', *Foreign Policy*, no. 69, pp. 22-39.

Artikel daring

- 'Keluarkan Dekrit, Mursi Dikritik Sebagai Firaun Baru', *Viva.co.id*, 23 November 2012, <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/369583-keluarkan-dekrit-presiden-mesir-dikritik-sebagai-firaun-baru>>, diakses pada 28 Desember 2016.
- 'Mursi Menangi Pilpres Mesir,' *Kompas.com*, 24 Juni 2006, <<http://internasional.kompas.com/read/2012/06/24/2202526-Mursi.Menangi.Pilpres.Mesir>>, diakses pada 25 Desember 2016.
- 'Presiden Mursi: Assad Penjahat Perang', *Tempo.co.id*, 7 Januari 2013, <<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/07/115452576/Presiden-Mursi-Assad-Penjahat-Perang>>, diakses pada 26 Desember 2016.
- Fillinger, E., *Mubarak Matters: The Foreign Policy of Egypt Under Hosni Mubarak*, <<http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/7795/Fillinger%20Eric%202009S.pdf?sequence=1>>, diakses pada 28 November 2016.
- Freitas, A., *Konstelasi Politik Mesir dan Harapan Transisi Perdamaian Timur Tengah*, <<http://www.disis-tl.org/wp-content/uploads/2011/12/KONSTELASI-PETA-POLITIK-MESIR-DAN-HARAPAN-TRANSISI-PERDAMAIAN-TIMUR.pdf>>, diakses pada 28 Desember 2016.
- Gonzalez, M., *Che Guevara dan Revolusi Kuba*, <<http://judicalsophie.files.wordpress.com/2008/12/che-guevara-dan-revolusi-kuba.pdf>>, diakses pada 12 Desember 2016.
- Grimm, J. & Roll, S., *Egypt Foreign Policy under Mohammed Morsi*, <http://www.swp-berlin.org/en/publications/swp-comments-en/swp-aktuelle-details/article/egypt_morsis_foreign_policy.html>, diakses pada 23 Desember 2016.

- Harris, D., 'Egypt Plays Central Role in Israeli-Palestinian Peace Effort', *People's Daily*, 15 September 2009, <<http://english.people.com.cn/0001/90777/90854/6758347.html>>, diakses pada 26 Desember 2016.
- Kouddous, S.A., 'Mohamed Morsi in the Middle', *The Nation.com*, 20 November 2012, <<http://www.thenation.com/article/171377/mohamed-morsi-middle>>, diakses pada 28 Desember 2016.
- Malek, D., 'Exclusive Interview With Mohamed Morsi: What to Expect From the Muslim Brotherhood', *Polycymic*, 24 June 2012, <<http://www.polycymic.com/articles/380/exclusive-interview-with-mohamed-morsi-what-to-expect-from-the-muslim-brotherhood>>, diakses pada 27 Desember 2016.
- Ottaway, M., President Morsi's Effect on Egyptian Foreign Policy, <<http://carnegieendowment.org/2012/09/27/president-morsi-s-effect-on-egyptian-foreign-policy/dyom>>, diakses pada 27 Desember 2016.
- Porter, K., 'The US-Egyptian Relationship', US Foreign Policy, <<http://usforeignpolicy.about.com/od/countryprofi3/p/usegyptprofile.htm>>, diakses pada 28 Desember 2016.
- Sharp, J.M., Egypt: Background and U.S. Relations, <<http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf>>, diakses pada 27 Desember 2016.

